

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	Bio Data Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Daftar Kekayaan, keuangan, asset, dan pendapatan /rekening bank PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindakan Kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
9	Internet Protocol / IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/penjebolan system pengaman komputer.	Melindungi/menjaga hak akses
10	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar peruntukan.	Mengatur Kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
11	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	1.UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J 2.UU No 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
13	Sistem Manajemen Database	1.UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J 2.UU No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
14	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP Pemohon izin;</li> <li>• PBB tahun terakhir;</li> <li>• NPWP Pribadi;</li> <li>• Surat Bukti Pemilikan Tanah;</li> <li>• Akta notaris.</li> </ul>	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Pribadi yang bersifat rahasia.
15	Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP Pimpinan / Direktur / Pemilik;</li> <li>• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak);</li> <li>• Akta pendirian perusahaan;</li> <li>• Ijasah dan KTP Penanggung Jawab Bidang /Teknik;</li> <li>• Surat Pengesahan Kehakiman/Pendaftaran Pengadilan Negeri;</li> <li>• Gambar Lokasi tempat Usaha/Gudang;</li> <li>• Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi;</li> <li>• Gambar /denah tempat usaha;</li> <li>• Sertifikat Tanah, Akte Jual-Beli, Sewa Tanah Pernyataan Pemilik.</li> </ul>	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 26 dan Pasal 32 2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan Pasal 16 huruf b.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
16	<p>Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambar dan/atau Photo lokasi;</li> <li>• Gambar Rencana;</li> <li>• Gambar Denah;</li> <li>• Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb;</li> <li>• Gambar Konstruksi;</li> <li>• Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li> <li>• Uraian rencana proyek yang akan dibangun.</li> <li>• Peta lokasi;</li> <li>• Peta penggunaan detail tanah ;</li> <li>• Peta Tata Ruang lokasi;</li> <li>• Peta Site Plan/Blok Plan;</li> <li>• Rencana tahapan pembangunan;</li> <li>• Izin lain yang dipersyaratkan;</li> <li>• Surat Rekomendasi;</li> </ul>	<p>1.UU No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32</p> <p>2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan Pasal 17</p>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau penipuan.
17	<p>Database Perizinan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No. Pendaftaran;</li> <li>• No. Izin;</li> <li>• Nama dan Alamat Pimpinan;</li> <li>• Jumlah Dibayarkan;</li> <li>• Tanggal Dibayarkan.</li> </ul>	<p>1.UU No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32</p> <p>2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</p>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Pemohon izin yang bersifat rahasia.

**7 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
**NIP. 19661207 198603 1 006**